

HEGEMONI “KUNINGISASI” BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Faradina Kartika Rizqiyah

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
faradinakr@gmail.com

Dr. M. Jacky, S.Sos., M.Si

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
jackyflinders@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang hegemoni yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pemerintah Kabupaten Jombang. Kantor Dinas-Dinas serta gedung-gedung sekolah di Kabupaten Jombang juga ikut merasakan kehadiran dari kuningisasi. Hingga seragam khusus batik untuk siswa-siswi SD, SMP, dan SMA Negeri juga diganti menjadi batik kuning dan hijau. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana hegemoni dan resistensi dari kuningisasi yang terjadi di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan hegemoni berhasil masuk ke dalam Dinas-Dinas dan juga Lembaga di Kabupaten Jombang. Hegemoni yang dirasakan berupa kebijakan dan anjuran mengenai kuningisasi. Meskipun anjuran kuningisasi tidak diumumkan secara resmi dari Bupati, perubahan dilakukan secara serempak oleh banyak Dinas-Dinas serta Lembaga di Kabupaten Jombang. Perubahan kuningisasi yang diawali oleh dominasi yang dilakukan oleh pemilik pemerintahan yang sah. Kemudian diciptakan konsensus yang dilakukan antara kepala Dinas dan Bupati atau orang-orang penting sebagai wakil dari Bupati. Dengan adanya dominasi dan konsensus tersebut akan muncul hegemoni. Meskipun Dinas-Dinas serta Lembaga merasakan adanya hegemoni, tetap saja ada beberapa yang melakukan resistensi sebagai bentuk penolakan. Meskipun resistensi tidak dilakukan secara langsung di depan masyarakat umum, fenomena kuningisasi juga mengalami resistensi dari beberapa pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana kritis sebagai teknik analisis data.

Kata Kunci : *Dominasi, Konsensus, Resistensi*

Abstract

This study examines the hegemony that occurs in civil servants a.k.a *PNS* of official institution district Government of Jombang. The official offices and the school buildings in Jombang Regency also felt the presence of *Kuningisasi*. Moreover, special batik uniforms for students of elementary, junior and senior high school are also changed into yellow and green batik. The purpose of this research to examine how the hegemony and resistance of the *kuningisasi* that occurred in Jombang. The result of this study indicates hegemony gave influence succesfully to all of official institutions in Jombang. Hegemony appears to give the form of policy or recommendation about *Kuningisasi*. The recommendation of *Kuningisasi* was not officially announced by the regent but the changing was made simultaneously by many official institutions in Jombang. Changing *Kuningisasi* is initiated by the dominance of legitimate government owners. Then, it was created by consensus between the head of the official institutions and the regent or famous people as representatives of the regent. Because there are domination and consensus so it appears Hegemony. Although official institutions and agencies have felt that there is the existence of hegemony, it is not for some people who do resistance as a refusal barrier. The resistance is not done directly in front of general public and the phenomenon of *Kuningisasi* also get experience of resistance from several parties. This study uses qualitative methods and uses the perspective of Critical Discourse Analysis. This research uses critical discourse analysis technique as analysis technique.

Keyword : *Domination, Consensus, Resistance*

PENDAHULUAN

Warna “Kuning-Hijau” sudah mulai menghiasi Jombang setelah Bupati Nyono resmi dilantik yaitu mulai dari tahun 2013. Tetapi akhir-akhir ini semakin banyak memenuhi seisi Kabupaten Jombang, bahkan menjelang akhir masa menjabat kuning hijau masih menghiasi

Kabupaten Jombang. Warna kuning hijau mulai menghiasi tiap sudut Kabupaten Jombang. Perubahan tersebut dimulai dari hal-hal yang kecil seperti tiang penyangga lampu di pinggir jalan raya dirubah menjadi kuning dan diberi pemanis warna hijau. Kemudian sarana dan prasarana lainnya seperti bangunan sekolah, perubahan dilakukan pada sekolah yang berstatus milik

Negara atau Negeri. Untuk sekolah-sekolah swasta tidak dilakukan perubahan warna seperti yang dilakukan oleh sekolah Negeri. Perubahan juga merambah ke tempat pelayanan kesehatan seperti RSUD Jombang dan Puskesmas-Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Jombang.

Kantor dinas-dinas di Kabupaten Jombang juga ikut merasakan kehadiran dari kuningisasi. mulai dari gedung dan atribut di dalam kantor juga mendapat sentuhan warna kuning hijau. Selain itu pohon-pohon dipinggir jalan raya di Jombang juga di cat kuning hijau, hingga seragam khusus batik untuk anak SD, SMP, dan SMA Negeri. Tidak hanya untuk para siswa-siswi, batik hijau kuning juga dikenakan oleh para PNS di seluruh Kabupaten Jombang. Selain seragam batik yang mendapatkan sentuhan kuning hijau, baju olahraga para PNS juga berwarna kuning hijau. Perubahan warna kuning hijau ini terjadi pada bangunan-bangunan yang awalnya tidak berwarna kuning dan hijau, kini berubah menjadi kuning dan hijau. Masalah ini mungkin terlihat sepele bagi beberapa orang, karena hanya mengganti warna cat untuk suatu benda atau bangunan. Misalnya semula warna cat sebuah bangunan berwarna biru, kini diganti menjadi kuning dan hijau. Tetapi mungkin saja berbeda dengan yang dirasakan oleh masyarakat Jombang.

Kuningisasi yang mulai memasuki Kabupaten Jombang ini seperti sebuah perubahan wajah kota Jombang. Perubahan yang terjadi saat semua mulai menjadi kuning dan hijau, bagi banyak masyarakat kota Jombang merupakan hal yang tidak bisa dianggap sepele. Perubahan kuningisasi ini sama saja dengan merubah wajah serta identitas dari kota Jombang, bahkan merubah sejarah kota Jombang. Konon menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kata “Jombang” merupakan sebuah akronim dari kata berbahasa Jawa, kata tersebut ialah “ijo” dan “abang”. Ijo atau hijau merupakan lambang dari kesejukan serta kedamaian. Ijo adalah simbol dari masyarakat Jombang yang menyandarkan hidupnya pada petunjuk, serta bimbingan dari tuhan YME. Demi menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak (Nanang, 2012: 2).

Ijo yang berarti mewakili para kaum santriwan dan santriwati (golongan agamis). Sedangkan arti dari “abang” atau merah adalah simbol yang melambangkan kerja keras dari masyarakat Jombang. Penuh dengan semangat juang tanpa mengeluh dan tak mengenal lelah, serta selalu berpikiran optimis. Kaum abangan lebih mengedepankan perjuangan untuk hidup berdampingan dengan sesama masyarakat dalam keadaan yang damai. Saling menghormati satu sama lain dan menjunjung tinggi kearifan budaya lokal Jombang. Singkatnya kaum abangan adalah kaum yang nasionalis atau kejawen. Kedua kelompok tersebut hidup saling berdampingan dan harmonis di Jombang. Bahkan kedua elemen warna ini digambarkan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang yaitu warna hijau dan merah. Untuk lambang dari Kabupaten Jombang yang berbentuk perisai dan didalamnya berisi : padi dan kapas, gerbang Mojopahit dan benteng, Balao Agung (Pendopo Kabupaten Jombang), menara dan bintang sudut lima

diatasnya beridiri pada beton lima tingkat, gunung, dua sungai satu panjang satu pendek.

Ketika maraknya kuningisasi ini, mobil siaga desa yang diberikan oleh Bapak Bupati untuk setiap desa juga tidak luput dari kuningisasi. Mobil siaga desa ini digunakan untuk membantu warga desa, untuk keperluan transportasi berobat ke rumah sakit di dalam kota maupun luar kota. Pada awalnya sempat lambang daerah Kabupaten Jombang yang ditempel pada mobil siaga desa dirubah warna dasarnya menjadi kuning dan hijau. Melihat hal tersebut tentunya ada saja masyarakat kota Jombang tidak terima dan mencoba menyuarakan lewat media sosial. Walaupun hanya ditempelkan ada mobil siaga desa, tetapi mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan yang mendesak bagi warga desa yang membutuhkan bantuan alat transportasi. Tidak hanya untuk kendaraan di dalam kota, bisa saja digunakan untuk keperluan ke luar kota. Misalnya untuk menuju rumah sakit yang lebih besar daripada di kota Jombang. Dengan dirubahnya warna dasar logo tersebut ketika dilihat oleh warga dari kota lain, tentunya identitas hijau dan merah atau ijo dan abang yang berarti Jombang akan hilang. Dengan adanya berbagai kejadian tersebut, banyak perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Bapak Bupati.

Diantaranya dengan membuat suatu gerakan yang dinamai “Save Jombang”. Para anak muda dan sebagian dari masyarakat Jombang membuat gerakan ini yang bertujuan untuk menentang kebijakan Bapak Bupati. Kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Bupati ini yang dimaksud adalah merubah identitas Jombang. Gerakan ini telah melakukan banyak kegiatan yang tujuannya untuk menghentikan “kuningisasi” yang semakin lama semakin menjadi. Bangunan-bangunan barupun tidak luput dari pengecatan kuning dan hijau. Padahal masa pemerintahan Bapak Bupati Nyono Suharli dan Ibu Munjidah ini hampir mendekati masa pergantian Bupati baru. Bapak Nyono diangkat sebagai Bupati pada tahun 2013 dan Meskipun banyak pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat Jombang, tetapi tidak semua masyarakat yang ikut dalam pertentangan ini. Ada juga masyarakat yang tidak peduli bahkan tidak mengerti arti dari perubahan yang dilakukan oleh Bapak Nyono.

Fenomena kuningisasi ini juga melanda para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Para PNS juga tidak luput dari dampak kuningisasi, salah satu contoh kecilnya seperti seragam dinas motif batik yang dirubah menjadi warna kuning hijau. Serta beberapa hal yang lain, meskipun gerakan penolakan mereka tidak terlalu kentara seperti yang dilakukan anggota save jombang. PNS yang bekerja di kantor-kantor Dinas Pemkab Jombang pastinya tidak semua berbendera kuning seperti Bupati Nyono Suharli. Tetapi dengan adanya kuningisasi mau tidak mau mereka harus menerima kedatangan “kuningisasi”. Kuningisasi yang menghiasi setiap sudut kota bahkan di dalam kantor Dinas dari para PNS Pemkab juga tidak luput dari kuningisasi. Meskipun dalam hal ini ada bantahan dari Bapak Bupati bahwa kuningisasi bukan perintah langsung yang turun dari beliau. Sehubungan dengan uraian diatas, peneliti bermaksud mengangkat

permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul : Hegemoni “Kuningisasi” bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang

LANDASAN TEORI

Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Gramsci melihat hegemoni dengan cara pandang yang berbeda. Hal ini karena pengalaman yang dialami oleh Gramsci sendiri. Gramsci melihat di tempat tinggalnya terjadi dominasi besar-besaran oleh pemerintah. Pemerintah menggunakan kekerasan consensus pemerintah dengan rakyatnya. Oleh Gramsci, hegemoni didefinisikan sebagai sebagai kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh kelas yang berkuasa (Ritzer, 2013: 300). Lebih jauh lagi Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni adalah suatu kondisi yang terjadi ketika kekuasaan, dominasi terhadap nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan di dalam sekelompok masyarakat. Dominasi yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat ini secara langsung tidak sadari dan hal ini dianggap sudah wajar oleh masyarakat. Hegemoni yang begitu besar membuat kaum kelas bawah tidak bisa berbuat apa-apa.

Ketika hegemoni masuk tidak hanya melalui kekuasaan fisik saja, hegemoni juga masuk melalui ideology-ideologi baru sehingga proses dominasi semakin besar. Konsep hegemoni tak hanya dapat membantu kita untuk memahami dominasi dalam kapitalisme, tetapi juga membantu mengorientasikan pemikiran Gramsci tentang revolusi. Revolusi belum cukup untuk mendapatkan pengendalian atas ekonomi dan aparatur negara, masih perlu mendapatkan kepemimpinan kultural atas aspek masyarakat lainnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jombang, khususnya di kantor-kantor Dinas Pemda Kabupaten Jombang yaitu Disbudpar dan SMA Negeri 1 Jombang. Fenomena ini memang sudah lama terjadi, dan menuai banyak protes dari masyarakat Jombang tetapi kuningisasi tetap dilakukan dimanapun di sekitaran Jombang.

METODE

Penelitian ini secara metodologi peneliti menggunakan metode kualitatif Beberapa hal yang dapat dilihat dari subyek di lapangan yaitu perilaku, pemikiran, motivasi dari subyek, tindakan untuk memperkuat bukti di lapangan, dan lain-lain (Moleong, 2010: 6). Metode kualitatif ini dipilih peneliti untuk melihat bagaimana persepsi para PNS di kantor Pemda Kabupaten Jombang mengenai Kuningisasi. Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif ini untuk mendapatkan informasi serta memperoleh cerita dari subyek yang ditentukan.

Peneliti memilih menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) Antonio Gramsci. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan interdisipiner terhadap suatu teks. Pendekatan ini melihat bahwa teks merupakan bentuk-bentuk dari gejala sosial (Ahmad, 2010: 53). Pendekatan analisis wacana kritis Gramsci ini sangat cocok digunakan untuk penelitian tentang kuningisasi di kantor Pemda Kabupaten Jombang. Analisis wacana yang memusatkan pada wacana atau

bahasa, kemudian dihubungkan dengan ideologi (Eriyanto, 2001: 15) Hal ini juga tidak dapat terlepas dari hegemoni yang dibawa dalam analisis wacana kritis oleh Gramsci. Kekuatan dari sebuah hegemoni dapat tercipta berupa cara berpikir atau wacana tertentu yang lebih dominan. Suatu wacana dapat dikatakan sebagai wacana yang benar, sedangkan wacana yang lain salah (Eriyanto, 2001: 104). Wacana kritis ini juga berarti ketika suatu nilai atau konsensus yang dianggap memang benar, sehingga ketika ada cara pandang atau wacana lain dianggap sebagai hal yang tidak benar.

Penelitian tentang kuningisasi ini peneliti memilih dua Kantor Dinas Pemda Kabupaten Jombang, dua lokasi tersebut digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai hegemoni kuningisasi : Disbudpar yang dulunya Disporabudpar saat ini telah dipisah menjadi dua Dinas yaitu Dispora dan Disbudpar. Meskipun telah berpisah menjadi dua Dinas tetapi gedung Dinas masih mempertahankan kuning hijau. Selain itu terdapat rumor jika perubahan kuning hiiju juga bagaikan memberikan ciri khas dan budaya baru Jombang. Sehingga peneliti memutuskan untuk memilih Dinas yang berhubungan dengan kebudayaan Kabupaten Jombang. Lokasi kedua yaitu SMA Negeri 1 Jombang sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Peneliti memilih SMA ini dikarenakan perubahan yang dilakukan mendahului beberapa sekolah lain yang masih berwarna hijau kuning. Penelitian ini telah dilakukan mulai dari bulan September hingga Oktober 2017. Penentuan subyek untuk penelitian harus sesuai agar mendapatkan informasi yang tepat mengenai kuningisasi. Peneliti memilih teknik pemilihan subyek *purposif*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuningisasi, peneliti ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang diperoleh peneliti dari subyek. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dilakukan peneliti dengan cara memperoleh data-data yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti mengambil dari buku-buku, skripsi, jurnal, tesis, dan melalui online. Pengumpulan data primer mengenai kuningisasi dilakukan beberapa cara yaitu : Melakukan wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari masing-masing Dinas. Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata informan memilih dua orang, yaitu bagian umum dan kepegawaian yang memiliki kewenangan dalam perubahan kuningisasi. Selanjutnya dari SMA Negeri 1 Jombang informan memilih Waka Sarana dan Prasarana serta Waka Humas. Kedua subyek tersebut juga memiliki kewenangan dan mengetahui dengan jelas bagaimana kuningisasi terjadi di SMA Negeri 1 Jombang. Wawancara yang dilakukan pada ke empat subyek tersebut dilakukan dengan maksud tertentu (Moleong, 2010: 186). Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap PNS ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kuningisasi. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian kuningisasi ini adalah *indepth interview* atau wawancara yang dilakukan secara mendalam. Metode *indepth interview* memiliki dua tahap yang dilakukan

untuk mendapatkan informasi mengenai makna kuningisasi. Dua tahap wawancara ini yaitu *depth in* dan *trust*. *Depth in* yang berarti membangun hubungan secara mendalam antara peneliti dan ke empat PNS yang telah dipilih oleh peneliti. Peneliti akan berusaha mendekati beberapa PNS yang akan dijadikan informan. Berikutnya adalah metode *trust* atau dibangunnya kepercayaan antara peneliti dengan subyek penelitian. Hubungan yang telah dibangun antara peneliti dan subyek akan tercipta sebuah kepercayaan, sehingga informasi yang akurat akan diperoleh peneliti dari subyek. PNS sebagai subyek penelitian tidak akan segan untuk memberikan informasi karena adanya kepercayaan tersebut. Selanjutnya dokumentasi juga dilakukan oleh peneliti sebagai data-data pendukung dari penelitian mengenai hegemoni kuningisasi. Dokumentasi ini berupa foto yang diperoleh secara langsung saat wawancara, kemudian foto-foto pendukung lain yang didapatkan oleh peneliti.

Teknik analisis data mengenai fenomena kuningisasi, peneliti menggunakan analisis wacana kritis Antonio Gramsci. Pendekatan analisis wacana kritis Gramsci ini digunakan peneliti untuk menganalisis temuan data, yang didapatkan di lapangan mengenai makna kuningisasi bagi PNS di kantor Pemda Kabupaten Jombang. Analisis wacana hampir sama dengan *French Discourse Analysis*, *Critical Linguistics* yang memusatkan pada wacana atau bahasa, kemudian dihubungkan dengan ideologi. Hal ini juga tidak dapat terlepas dari hegemoni yang dibawa dalam analisis wacana kritis oleh Gramsci. Kekuatan dari sebuah hegemoni dapat tercipta berupa cara berpikir atau wacana tertentu yang lebih dominan. Suatu wacana dapat dikatakan sebagai wacana yang benar, sedangkan wacana yang lain salah (Eriyanto, 2001: 104). Sebagai contohnya ketika suatu nilai atau konsensus yang dianggap memang benar oleh sebagian orang, tetapi menurut pihak lain konsensus tersebut tidak benar. Seperti yang terjadi di kabupaten Jombang khususnya di kantor Dinas Pemda Kabupaten Jombang, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan SMA Negeri 1 Jombang. Terdapat dugaan adanya motif tertentu dibalik kuningisasi ini. Diduga banyak cara pandang yang berbeda mengenai hegemoni "kuningisasi". Khususnya bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Jombang, yang posisinya paling dekat dengan pemerintahan Bupati saat ini. Diduga mencoba untuk mengubah wajah Kabupaten Jombang dengan menghadirkan "Kuningisasi".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Antonio Gramsci suatu klas sosial mendapatkan supremasi (kekuasaan tertinggi) ketika mewujudkan dirinya dengan dua cara. Cara yang pertama melalui dominasi yang berawal dari realitas kemudian menyebar di dalam masyarakat. Dominasi tersebut juga bisa menyebar di dalam lembaga sehingga akan muncul golongan yang mendominasi (Patria dan Arief, 1999: 121). Pengaruh dari dominasi ini akan membentuk suatu moralitas dalam masyarakat. Konsep dominasi secara tidak langsung akan menimbulkan suatu paksaan (*coersion*) bagi pihak yang lemah tanpa kekuasaan. Selanjutnya supremasi dapat diwujudkan melalui

kepemimpinan dari kaum intelektual dan moral. Jika kedua hal tersebut bisa dilakukan akan terwujud suatu kelompok akan mendapatkan supremasi klas. Seperti perubahan yang terjadi di Disbudpar Kabupaten Jombang dan SMA Negeri 1 Jombang, perubahan kuningisasi dapat terjadi dikarenakan adanya pengaruh dominasi oleh Bupati sebagai pemilik kekuasaan tertinggi disuatu pemerintahan Kabupaten. Dalam suatu pemerintahan hegemoni berkaitan dengan penyusunan kekuatan negara, kekuatan negara yang kuat akan menciptakan negara yang diktator.

Hegemoni juga merujuk pada suatu ideologis dari kelompok atau klas tertentu dalam masyarakat. Ideologi yang dapat mempengaruhi akan membuat klas tertentu lebih tinggi dari pada klas disekitarnya. Kelompok sosial yang menjadi dominasi akan mempraktekkan kekuasaan. Bahkan ketika kelompok tersebut telah memegang kekuasaan penuh ditangannya, mereka akan terus berusaha mempertahankan dan selalu memimpin. Hal ini menunjukkan jika supremasi dapat dicapai oleh dua konsep yaitu kepemimpinan (*direction*) dan dominasi (*dominance*). Bentuk hegemoni yang dibawa dalam masa kepemimpinan kuningisasi ini adalah hegemoni dengan pendekatan moral. Kuningisasi yang bebas melenggang hingga saat ini karena kekuasaan dari pemimpin, yang berhasil menundukkan para pegawai pemerintahan dengan moral yang telah dibuat. Hegemoni dengan menggunakan pendekatan moral ini akan membuat pegawai pemerintahan selalu mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Jika tidak melakukan dikhawatirkan akan ada sanksi dan hal buruk lainnya. Perubahan kuningisasi bermula dari mulai berubahnya GOR (Gelanggang Olah Raga) Jombang. GOR merupakan salah satu tempat yang tidak hanya digunakan oleh masyarakat Jombang sendiri. GOR juga digunakan sebagai tempat pertemuan dalam rangka kegiatan perlombaan di bidang olahraga maupun non keolahragaan, yang diikuti peserta-peserta lain selain Jombang. Seperti perlombaan silat, perlombaan bola voli, selain itu untuk kegiatan non keolahragaan seperti perlombaan baris berbaris untuk tingkat se- Jawa Timur juga dilakukan di GOR Jombang. Mengingat GOR digunakan sebagai tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang-orang dari luar kota, menjadikan GOR sebagai salah satu simbol atau ikon yang akan menggambarkan bagaimana suatu Kota/Kabupaten tersebut. GOR yang mulai dirubah menjadi kuning dan hijau menandakan sebagai awal masuknya kuningisasi di Kabupaten Jombang. Perubahan ini menunjukkan bagaimana kuningisasi memiliki kekuatan yang sangat mendominasi dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Perubahan ikon-ikon di Kabupaten Jombang seperti GOR Jombang ini tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki dominasi yang kuat.

Hegemoni kuningisasi seperti halnya yang terjadi pada GOR Jombang juga dirasakan oleh para PNS, hegemoni tersebut seperti kebijakan dan anjuran mengenai kuningisasi. Meskipun kebijakan tersebut tidak diumumkan secara resmi dari Bupati, tetapi secara serempak dilakukan oleh banyak Dinas-Dinas di

Kabupaten Jombang. Meskipun ada anjuran perubahan kuningisasi tetapi hal tersebut seperti ditutupi karena tidak ingin terlihat benar-benar mengubah Jombang

kuning hijau yang diawali oleh dominasi yang dilakukan oleh pemilik pemerintahan yang sah. Kemudian diciptakan konsensus yang dilakukan antara kepala Dinas dan orang-orang penting sebagai wakil dari Bupati, atau bisa saja konsensus dilakukan langsung oleh Dinas masing-masing termasuk Disbudpar dan SMA Negeri 1 Jombang. Konsensus yang berhasil dibawa masuk akhirnya merubah warna gedung Disbudpar dan SMA Negeri 1 Jombang. Tidak hanya berubah pada warna gedung, kuningisasi juga berdampak pada individu PNS yaitu berupa seragam batik dengan warna kuning dan hijau. Tetapi hegemoni kuningisasi juga menimbulkan resistensi seperti yang terjadi pada SMA Negeri 1 Jombang, yang melakukan perubahan warna gedung menjadi putih biru. Perubahan tersebut dilakukan dengan alasan warna yang sudah memudar. SMA Negeri 1 Jombang lebih memilih warna biru putih, dengan alasan mengacu pada Propinsi yang menggunakan warna biru putih sebagai lambang dari Tutwuri Handayani.

PENUTUP

Simpulan

Hegemoni kuningisasi dapat terjadi ketika pemimpin mendapatkan supremasi kelas (kekuasaan tertinggi). Untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi seorang pemimpin harus berhasil melakukan dominasi dengan cara kepemimpinannya. Setelah berhasil dilakukan dominasi harus ada konsensus yang disetujui antara pemimpin dan PNS selaku bawahan. Konsensus tersebut berisi persetujuan agar kuningisasi dapat memasuki Dinas atau Lembaga di Kabupaten Jombang. Tahapan-tahapan tersebut akan melahirkan hegemoni yang secara tidak sadar akan dilakukan sukarela oleh PNS. Hegemoni yang terjadi pada PNS Dinas Kabupaten Jombang ini menggunakan hegemoni dengan pendekatan moral. Hegemoni moral yang dilakukan oleh pemimpin terhadap PNS selaku pegawai pemerintahan. Kekuatan dari

menjadi kuning hijau. Satu persatu Dinas mulai merubah warna gedung menjadi kuning dan hijau. Perubahan

pemimpin berhasil menundukkan para pegawai pemerintahan dengan moral yang telah dibuat. Hegemoni dengan menggunakan pendekatan moral ini akan membuat pegawai pemerintahan selalu mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Jika tidak melakukan dikhawatirkan akan ada sanksi dan hal buruk lainnya.

Saran

Perubahan kuningisasi ini seharusnya tidak dilakukan secara besar-besaran, karena banyak yang beranggapan bahwa kuning hijau sudah menjadi identitas Jombang. Pemerintah harusnya tetap mempertahankan karakter Jombang dengan simbol hijau dan merah atau “Ijo Abang” yang menjadi akronim Jombang, sebagai ciri khas dari Kabupaten Jombang. Seharusnya perubahan kuningisasi yang dilakukan secara berlebihan dikhawatirkan akan membuang-buang anggaran, jika alasannya hanya untuk merubah warna-warna gedung di Kabupaten Jombang. Selain itu perubahan kuningisasi yang mengandung unsur politik sebaiknya tidak masuk ke dalam lembaga-lembaga seperti sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Munawar. 2010. *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nanang, dkk. 2012. *Sejarah dan Budaya Jombang*. Jombang: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang
- Patria Nezar dan Andi Arief. 1999. *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2013, *Teori Sosiologi Modern, Edisi Ke-6*, Jakarta: Kencana.